

**PELAKSANAAN GOLLA KAMBU DALAM MENINGKATKAN PENERBITAN
KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KABUPATEN MAMUJU PROVINSI
SULAWESI BARAT**

SANIY ZIYAN FASYA BASIR, ASTRI NUR FAUZIYAH, ELVIN PRIMADHANI

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

29fasyab@gmail.com, astrin51@yahoo.com, elvin.primadhani@gmail.com

Abstract: *The implementation of Child Identity Cards (KIA) in Mamuju Regency experienced delays in implementation which resulted in the issuance and ownership of the card being relatively low and had not reached the national target of 30% even though the Mamuju Regency Population and Civil Registration Office carried out innovative activities in the form of The Population and Civil Registration Ball Movement for Mamuju Regency to improve the quality of population administration services. Purpose: The purpose of this study was to determine the implementation of Golla Kambu in increasing the issuance of Child Identity Cards (KIA), obstacles and efforts to overcome obstacles to the implementation of Golla Kambu in the issuance of Child Identity Cards (KIA). Method: This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach to implementation according to the theory of George R. Terry. Data collection techniques were carried out by interview, observation and documentation. Result: The findings obtained by the authors in this study are that the issuance of Child Identity Cards (KIA) through the implementation of Golla Kambu has increased and is classified as good, although it is still constrained by infrastructure, budget and the level of public awareness and understanding. Conclusion: The implementation of Golla Kambu in increasing the issuance of Child Identity Cards (KIA) has been going well, this is due to the collaboration and coordination of the Population and Civil Registration Office with several local SKPD by utilizing public places and community leaders. In order to optimize the implementation of Golla Kambu, it is recommended to use social media in disseminating information and making standard operating procedures for special procedures for issuing Child Identity Cards (KIA) through Golla Kambu.*

Keywords: *Participation; Youth Generations; Lorong Literasi Gowa Programs*

Abstrak: Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Mamuju mengalami keterlambatan pelaksanaan yang mengakibatkan penerbitan dan kepemilikan kartu tersebut tergolong rendah dan belum mencapai target nasional sebesar 30% padahal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju melakukan inovasi kegiatan berupa Gerakan Jemput Bola Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi penduduk. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Golla Kambu dalam meningkatkan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), hambatan serta upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Golla Kambu dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Metode: Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif terhadap pelaksanaan menurut Teori Goerge R.Terry. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui pelaksanaan Golla Kambu mengalami peningkatan dan tergolong baik, meskipun masih terkendala dengan sarana prasarana, anggaran serta tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat. Kesimpulan: Pelaksanaan Golla Kambu dalam meningkatkan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) telah berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan adanya kerjasama dan koordinasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan beberapa SKPD setempat dengan memanfaatkan tempat umum dan tokoh masyarakat. Guna mengoptimalkan pelaksanaan Golla Kambu ini, disarankan untuk memanfaatkan media social dalam penyebaran informasi dan pembuatan standar operasional prosedur khusus dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui Golla Kambu.

Kata kunci: Pelaksanaan, Golla Kambu, Kartu Identitas Anak

A. Pendahuluan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 7 yang menyebutkan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun yang diterbitkan oleh instansi pelaksana terkait sebagai identitas kependudukan anak yang akan member perlindungan dan peningkatan pendataan untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak. Program Kartu Identitas Anak (KIA) ini dilaksanakan oleh setiap provinsi di Indonesia dengan menyesuaikan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 471.13/13242/DUKCAPIL Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA). Dalam pelaksanaannya, penerapan program ini di Kabupaten Mamuju baru diluncurkan pada tanggal 5 Mei 2019. Keterlambatan ini dikarenakan Kabupaten Mamuju baru ditetapkan sebagai 40 daerah Kabupaten/Kota perwakilan setiap provinsi yang melaksanakan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2018. Sesuai Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13-257 DUKCAPIL tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2018.

Keterlambatan pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Mamuju pada pertengahan tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2016-2018 belum memenuhi persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran sekitar 80%. Selain itu, belum adanya anggaran terhadap program dan melihat kondisi masyarakat pada saat itu belum dianggap penting untuk memiliki dokumen tersebut.

Tabel 1 Jumlah Kepemilikan KIA Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Semester II s.d Tahun 2020 Semester II

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Persentase yang Sudah Memiliki (%)
	Wajib KIA	Sudah Memiliki	Belum Memiliki	
2019 Semester II	95.703	4.789	90.914	5,00
2020 Semester I	94.230	10.809	83.421	11,47
2020 Semester II	94.437	12.415	82.022	13,14

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2020

Berbagai upaya dilakukan oleh pihak dinas untuk meningkatkan kualitas dengan layanan terintegrasi atau jemput bola dengan istilah Golla Kambu (Gerakan Jemput Bola Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju) yang sudah terlaksana pada tahun 2018 namun belum diketahui oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Mamuju. Kurang aktif dan inovatifnya pegawai dalam mensosialisasikan program Kartu Identitas Anak (KIA) melalui gerakan jemput bola baik melalui media cetak maupun media sosial membuat masyarakat masih belum paham dalam urgensi kepemilikan kartu. Selain itu, kurang pemahannya lansia dalam menggunakan layanan online dalam website resmi Dinas serta keterbatasan akses jaringan internet yang tidak merata di sebagian wilayah di Kabupaten Mamuju.

Rendahnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Mamuju menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Beberapa permasalahan dalam pelayanan dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) diantaranya kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang membuat minim informasi akan manfaat dan fungsi, mekanisme prosedur yang belum jelas dan dianggap panjang serta memerlukan biaya serta kurangnya akses jaringan internet kantor dan transportasi yang jauh dari kantor. Selain itu, masih ditemukan kesalahan dalam penginputan data yang tentunya memerlukan waktu dalam perbaikannya. Kurang aktif dan inovatifnya pegawai dalam mensosialisasikan program Kartu Identitas Anak (KIA) melalui gerakan jemput bola baik melalui media cetak maupun media sosial membuat masyarakat masih belum paham dalam urgensi kepemilikan kartu. Selain itu, kurang pemahannya lansia dalam menggunakan layanan online dalam website resmi Dinas serta keterbatasan akses jaringan internet yang tidak merata di sebagian wilayah di Kabupaten Mamuju dan jarak kantor yang jauh sehingga memilih untuk mengurus dokumen tersebut ketika dalam keadaan mendesak. Adapun dampak yang terjadi apabila permasalahan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) belum diatasi akan menghambat proses administratif lain terutama bidang

pendidikan dan kesehatan dalam kelengkapan beasiswa bagi anak dengan keterbatasan ekonomi dan tidak terdaftar dalam Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang meringankan biaya pengobatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pelaksanaan Golla Kambu dalam meningkatkan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), menganalisis dan mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Golla Kambu dalam meningkatkan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) serta menganalisis dan mengetahui upaya dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan Golla Kambu dalam meningkatkan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini menggunakan teori Goerge R.Terry mengenai teori pelaksanaan yang dimana dikatakan berhasil dengan melihat beberapa dimensi yaitu kepemimpinan, sikap dan moril, komunikasi, pendorong, supervisi, dan disiplin. Pelaksanaan merupakan suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dan menganalisis data dari hasil proses observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019:323) menjelaskan bahwa sejak awal proses pengumpulan data di lapangan sampai penelitian hasil penelitian analisis data sudah dilaksanakan dalam periode waktu yang telah ditentukan. Analisis data kualitatif dilakukan dengan interaktif meliputi reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 12 orang informan yang terdiri dari kepala dinas, kepala bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, kepala Seksi Pengelolaan Data Kependudukan, pegawai (2 orang), camat mamuju dan masyarakat (6 orang). Adapun analisisnya, peneliti melakukan analisa berdasarkan tinjauan teoritis menurut Goerge R.Terry mengenai teori pelaksanaan sehingga diperoleh 3 kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah.

C. Hasil dan Pembahasan

Penulis menganalisis pelaksanaan Golla Kambu dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Mamuju menggunakan teori Pelaksanaan menurut Goerge R.Terry yang menyatakan suatu pelaksanaan dikatakan berhasil dengan melihat beberapa dimensi sebagai berikut:

Kepemimpinan dalam pelaksanaan Golla Kambu diukur melalui dua indikator yaitu gaya kepemimpinan dan peran pemimpin dalam memberikan arahan, mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah serta peran Kepala Dinas bersama dengan jajarannya telah mampu menghadirkan sosok pemimpin yang bertanggung jawab dalam mengarahkan anggotanya dan sesuai dari arti kepemimpinan. Kepemimpinan dalam kegiatan Golla Kambu ini telah efektif dalam pencapaian tujuan peningkatan penerbitan KIA, dan kepemimpinan Kepala Dinas beserta dengan beberapa seksi dan bidang-bidang didalamnya telah mampu menggerakkan dan mempengaruhi para pegawai dibawah naungan tugasnya dalam melaksanakan tugas dengan baik.

Sikap dan Moril dalam pelaksanaan Golla Kambu melalui dua indikator yaitu perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan dan respon masyarakat. Perilaku pegawai saat pelaksanaan Golla Kambu dan penerbitan KIA ini berpedoman pada arahan dari pimpinan dan juga tupoksi pegawai dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi sebagai bentuk dari pelayanan public sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang didalamnya dimuat asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik dan pegawai mampu menyikapi masyarakat yang masih belum paham akan persyaratan dan alur dari penerbitan KIA ini dengan langsung memberikan informasi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Komunikasi dalam pelaksanaan Golla Kambu diukur melalui beberapa indikator yaitu sosialisasi persyaratan dan SOP, koordinasi dan kerjasama serta tingkat pemahaman

masyarakat. Pelaksanaan Golla Kambu telah mengimplementasikan 3 model komunikasi yang menjadi kunci utama ditinjau dari sisi internal, komunikasi dan koordinasi yang telah dilakukan adalah melakukan rapat guna menunjuk pegawai yang akan bertugas langsung ke lapangan, membuat jadwal pelaksanaan serta penentuan lokasi Golla Kambu tersebut. Ditinjau dari sisi eksternal, pihak Dinas melakukan kerjasama yang dimuat dalam sebuah surat perjanjian kerjasama dan pemanfaatan data administrasi kependudukan sehingga memiliki hak untuk mengakses data masyarakat. Juga pihak Dinas telah membuat alur penerbitan KIA yang telah dibentuk dalam spanduk yang dipasang di dinding kantor dan juga disosialisasikan dan disebarluaskan melalui media cetak yang dibagikan kepada masyarakat.

Pendorong dalam pelaksanaan Golla Kambu diukur melalui dua indikator yaitu motivasi/penghargaan (*reward*) dari pimpinan dan kondisi sarana dan prasarana. Ditinjau dari motivasi pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas dan beberapa Kepala Bidang maupun Seksi telah memberikan pengarahan dan motivasi kepada bawahannya sebagai bentuk simpati dan pemberian kekuatan baik berupa materi maupun moril. Sebagai bentuk apresiasi diberikan penghargaan atau *reward* kepada pegawai teladan yang telah mencerminkan sikap yang baik serta bertanggung jawab atas beban tugas yang diberikan. Ditinjau dari sisi sarana dan prasarana, pelaksanaan Golla Kambu dalam menerbitkan KIA ini masih memiliki keterbatasan terutama dalam hal komputer, printer, ruangan hingga transportasi.

Supervisi dalam pelaksanaan Golla Kambu diukur melalui indikator yaitu keikutsertaan pimpinan, kesesuaian SOP, serta teguran baik lisan maupun tulisan serta evaluasi kegiatan. Kehadiran pimpinan dalam hal ini kepala dinas dan beberapa kepala bidang yang turun langsung dalam pelaksanaan Golla Kambu dalam meningkatkan penerbitan Kartu Identitas Anak mampu memberikan paradigma baru kepada masyarakat bahwa pemerintah daerah hadir ditengah-tengah permasalahan masyarakat yang sulit mengakses kebutuhan administrasi kependudukannya karena faktor jarak yang cukup jauh dari pusat pelayanan. Selanjutnya, dalam kesesuaian SOP terhadap pelaksanaan kegiatan masih kurang karena untuk alur dan SOP dari pelaksanaan Golla Kambu sendiri tidak dibuatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju sehingga kejelasan alur dan SOP dari kedua kegiatan ini sangat penting untuk dirumuskan Kembali.

Disiplin dalam pelaksanaan Golla Kambu diukur dengan beberapa indikator yakni kecepatan, ketepatan dan kesesuaian waktu, konsistensi dan tanggung jawab pegawai serta kompetensi dan keahlian pegawai. Penerbitan KIA di Kabupaten Mamuju telah memiliki kejelasan waktu dan prosedur pelayanan yang telah ditetapkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Negeri Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/1879 DUKCAPIL tentang Pelaksanaan Program Penerapan Kartu Identitas Anak dan Pemanfaatannya. Kegiatan Golla Kambu guna mencapai sasaran kepemilikan KIA ini telah memiliki sistem pelayanan yang adaptif terhadap keluhan masyarakat dan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dilapangan.

Pelaksanaan Golla Kambu dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Mamuju memberikan dampak positif dalam peningkatan kepemilikan KIA, Golla Kambu merupakan salah satu inovasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi publik yang dalam pelaksanaannya ikut serta Bupati Mamuju sebagai bukti pemerintah peduli kepada masyarakat. Selanjutnya penerbitan KIA melalui kegiatan Golla Kambu ini belum memiliki standar prosedur pelayanan khusus. Dan masyarakat berpartisipasi dan memberikan respon yang cukup baik karena kegiatan ini menerapkan konsep hadirnya pemerintah dalam mengatasi keluhan masyarakat dalam kelengkapan data dan dokumen kependudukan terutama KIA. Pemerintah setempat berhasil menumbuhkan kesadaran sebagai salah satu bentuk kedisiplinan masyarakat dalam melengkapi dokumen kependudukannya sesuai dengan hasil penelitian penelitian Marselus (Marselus, 2018).

Alokasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Golla Kambu ini harus disesuaikan kembali sehingga menunjang proses pelaksanaannya. Adanya inovasi kegiatan ini juga diharapkan secara jangka panjang tetap dilaksanakan sehingga mampu mengubah

paradigma masyarakat sehingga terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan memperkuat status hukum keberadaan dan perlindungan anak terutama anak yang berusia dibawah 17 tahun.

D. Penutup

Penulis menyimpulkan pelaksanaan Golla Kambu dalam meningkatkan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) telah berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan adanya kerjasama dan koordinasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan beberapa SKPD setempat dengan memanfaatkan tempat umum dan tokoh masyarakat. Guna mengoptimalkan pelaksanaan Golla Kambu ini, disarankan untuk memanfaatkan media social dalam penyebaran informasi dan pembuatan standar operasional prosedur khusus dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui Golla Kambu.

Daftar Pustaka

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju. 2020. Data Kepemilikan KIA Semester II Tahun 2019 sampai Semester I Tahun 2020. Mamuju.
- Maria Mercilin dan Emei Dwinanarhati Setiamandani, 2019. "Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)". Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), Vol. 8 No.4 ISSN. 2442- 6962
- Marcellus Yollan dan Noora Fithriana, 2018. "Inovasi Jemput Bola Administrasi Kependudukan (Jebol Anduk) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik". Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), Vol. 7 No. 3, ISSN. 2442-6962
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak
- Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13-257/13243 DUKCAPIL Tahun 2016 tentang Pelaksana Program Penerapan Kartu identitas Anak (KIA)
- Sinambela, L. P. 2018. *Reformasi Pelayanan Publik Teori Kebijakan, dan Implementasi..* Jakarta:PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Terry, G. R. 2006. *Prinsip-prinsip Manajemen*, terj. Jakarta: Bumi Aksara.
- Terry, G. R. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen, Alih Bahasa, G.A Ticolau.* Jakarta : Bumi Aksa.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik